

MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERBANGSA MELALUI BUDAYA DEMOKRASI

Sri Rahayu Wilujeng

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang 50275

Email: srahayuwilujeng@yahoo.co.id

Abstract

Democracy is the old issue has been discussed for long time enthusiastically. This idea of democracy appeared in Greece about two thousand and five hundred years ago. Now day implementation of democracy keep going on developed to get the best performance. The Indonesian Constitution stated. Democracy as a system in running government. Thus, consequently of this choice it must be applied imperatively. In fact, there are many problems appeared caused by implementation of democracy. It may not be comprehended as a political system. Basically this system arranges so many interests in society such as state and citizens. Thus such a system must be help by a supporting culture. That is democratic culture. This writing tries to descript what kind a culture have to develop in Indonesia. This culture is bear on a mental and moral attitude. It bases on Pancasila as a philosophy of Indonesia. It doesn't only caused democracy running well, but it also guards democracy don't losing its essence. Finally, democracy gives advantages for people as the owner of sovereignty.

Keywords: democracy, culture, Pancasila

I. PENGANTAR

Manusia adalah makhluk yang unik sekaligus rumit. Dengan keunikan dan kerumitannya usaha untuk memahami manusia dengan segala aktifitasnya tidak pernah berhenti. Menurut seorang filsuf Yunani Kuno manusia adalah *Animal Sociale*. Manusia adalah binatang yang hidup bersama. Ia tidak hanya hidup ada bersama dengan yang lain, tetapi hanya bisa hidup dalam kebersamaan dengan yang lain. Manusia juga sering disebut *Zoon Politicon*, manusia adalah binatang yang mempunyai kepentingan. Kepentingan itu lebih

luas dari sekedar kebutuhan. Adanya berbagai kepentingan dalam dalam konteks kehidupan bersama sering kali memunculkan konflik. Manusia juga disebut sebagai *makhluk konflikatif*. (Beachler, 2001: 18)

Dalam sejarah perkembangan kehidupan umat manusia lahirlah suatu sistem untuk mengatur kehidupan bersama. Sistem ini pada dasarnya untuk menjaga ketertiban agar berbagai kepentingan dalam komunitas tidak saling bertabrakan. Sistem ini secara alamiah lahir di dalam kehidupan bersama. Pada awalnya

sistem ini masih dalam bentuk yang sederhana yang sering disebut sistem kemasyarakatan.

Sistem kemasyarakatan yang ada dalam berbagai kebudayaan ini merupakan benih bagi munculnya sistem-sistem lain yang lebih kompleks untuk mengatur kepentingan yang lebih luas.

Sistem kemasyarakatan yang ada pada kehidupan manusia terus berkembang. Kehidupan manusia terbuka bagi segala kemungkinan, sehingga kemajuan dan perkembangan senantiasa bergerak tanpa henti. Hal ini berlainan dengan kehidupan pada binatang. Sistem kemasyarakatan yang mengatur mereka bersifat pasif. Organisasi pada dunia lebah, sekawanan mamalia atau kera dari dahulu sampai sekarang tidak mengalami perubahan.

Salah satu sistem yang mengatur kepentingan bersama adalah sistem politik. Dalam sejarah sistem politik telah melewati jalan panjang. Sistem yang sederhana yang mengatur sekelompok kecil dalam suku-suku sampai saat ini masih hidup. Sementara sistem politik dewasa ini telah berkembang menjadi sistem yang sangat kompleks yang dipengaruhi berbagai kepentingan. Beberapa sistem politik yang pernah berkembang diantaranya monarkhi, aristokrasi, plutokrasi, meritokrasi, oligarkhi, dan demoktrasi. Di antara sistem tersebut dewasa ini demokrasilah yang paling dipercaya sebagai alternatif paling baik.

Demokrasi adalah masalah yang sudah lama diperbincangkan. Ide yang muncul kira-kira 2500 tahun yang lalu di Athena sampai sekarang masih tetap diperbincangkan secara antusias. Sampai saat ini praktek demokrasi terus berkembang mencari formatnya

yang paling baik. Bangsa Indonesia secara konstitusional telah memilih demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai suatu pilihan sistem ini secara imperatif harus dilaksanakan. Dalam kenyataannya banyak sekali muncul permasalahan akibat dari penerapan demokrasi di Indonesia.

Perkembangan demokrasi memperlihatkan fenomena keluar dari esensinya. Demokrasi yang hanya dilihat sebagai proses politik (pengelolaan kepentingan) akan menghadirkan konflik. Sebagai suatu sistem harus ditopang demokrasi sebagai budaya. Dalam tulisan ini berusaha di kaji budaya macam apa yang harus dikembangkan dalam demokrasi di Indonesia, sehingga demokrasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Atas dasar *Core Value* apa budaya demokrasi ini selayaknya dikembangkan.

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian singkat masalah aktual yang dipaparkan dalam gagasan konseptual. Tulisan ini mempunyai objek material adalah masalah politik terutama demokrasi. Objek formal tulisan ini adalah menelaah permasalahan demokrasi dalam kaitannya dengan budaya. Dalam tulisan ini dipergunakan beberapa langkah metodis yaitu :

1. Deskripsi: yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang beberapa masalah mendasar yang menjadi perhatian dalam tulisan ini. Demikian juga hasil penelitian dideskripsikan secara secara jelas.
2. Interpretasi, yaitu melakukan interpretasi/penafsiran terhadap konsep demokrasi Pancasila

3. Analisa-Sintesa, yaitu melakukan analisa secara cermat terhadap beberapa permasalahan, dicari penyebab pokok permasalahan dan hubungan beberapa hal tersebut. Dari beberapa analisa ini dibuat satu sintesa yang menghasilkan gambaran umum pembahasan.

II. PEMBAHASAN

A. Selintas Sejarah Demokrasi

Demokrasi merupakan masalah lama yang sampai saat ini masih tetap diperbincangkan. Pada dasarnya munculnya ide tentang demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan untuk mengatur kepentingan bersama beriringan dengan munculnya jaman *logos* di kawasan Yunani. Sebagaimana diketahui jaman *logos* yang muncul pada abad ke lima sebelum Masehi menggeser jaman *mitos*. Jaman *logos* ditandai dengan adanya tradisi kritis dalam menerima kebenaran pengetahuan dan tradisi kreatif dalam mencari solusi mengatasi permasalahan pragmatis. Lengersnya jaman *mitos* yang menerima kebenaran secara dogmatis telah memunculkan ide kreatif tentang adanya sistem penyelenggaraan kekuasaan dalam rangka mengatur kepentingan bersama. Demokrasi pada dasarnya bergerak pada dua tataran, yang pertama tataran epistemologis (sebagai suatu pengetahuan yang dipelajari), yang ke dua pada tataran praktis yaitu suatu tatanan untuk mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bersama.

Ide demokrasi dalam tataran epistemologis muncul pada abad ke lima sebelum Masehi di Athena Yunani. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari kata *demos* yang artinya

rakyat dan *kratos* kekuasaan. Dalam waktu yang hampir bersamaan di wilayah lain (Romawi) diperkenalkan istilah *Republic* yang berasal dari kata *res*: kekuasaan dan *publica*: rakyat banyak. Pada hakekatnya antara demokrasi dan republic secara terminologis adalah sama. Sementara itu di wilayah lain prinsip ajaran demokrasi telah dipraktekkan di Mesir jauh sebelum gelombang demokrasi muncul di Yunani.

Menurut pendapat Yves Schemel yang dikutip oleh Suyatno dijelaskan bahwa demokrasi sebenarnya sudah ada sejak jaman Mesir Kuno dan Mesopotamia Kuno. Saat itu telah dibentuk dewan kota dan majelis yang jauh lebih demokratis dari pada model "*polis*" Yunani, (Supriyo Priyanto, 2010, 118) Para anggota dewan lebih bebas berbicara, selain itu wanita juga diperkenankan menjadi anggota. Aturan seperti ini tidak dapat dijumpai pada praktek demokrasi di Yunani dimana wanita tidak dianggap sebagai warga (*citizen*) sehingga tidak bisa menjadi anggota dewan. Kelebihan lain adalah adanya aturan yang bisa mengakomodasi pluralisme dan sudah mengenal sistem delegasi yang bisa menggambarkan representasi atas konstituennya. (Suyatno, 2004: 5-6).

Sementara itu pendapat Samuel P. Huntington yang banyak menjadi rujukan dalam diskursus politik menggambarkan perjalanan demokrasi jauh lebih singkat. Sejarah demokrasi bukanlah suatu gerak maju yang lambat dan pasti melainkan serangkaian gelombang yang telah maju, mundur, lalu bergulung-gulung dan memuncak lagi. (United State Agency, 1991: 25). Pendapat

Huntington ini tidak memberikan gambaran sejarah demokrasi secara komprehensif karena hanya memotret perjalanan demokrasi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa demokrasi telah melewati sejarah yang panjang hampir selama dua ribu limaratus tahun lebih. Dalam tulisan ini tidak akan dikemukakan secara rinci tentang sejarah demokrasi, tetapi hanya mengungkapkan tonggak-tonggak sejarah demokrasi yang paling pokok. Yang menjadi fokus tulisan ini bukanlah masalah sejarah. Sejarah ini diungkapkan sejauh masalah itu memberikan pemahaman tentang perkembangan makna demokrasi.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Huntington tentang penggolongan sejarah demokrasi, namun penulis mempunyai pendapat yang berbeda mengenai masalah ini. Menurut Huntington sejarah demokrasi melewati tiga gelombang yang dimulai pada abad ke-19 sebagai gelombang pertama. Gelombang berakar pada revolusi Perancis. Sementara di Amerika Serikat ditandai dengan meluasnya hak pilih sampai mencakup porsi yang besar penduduk pria. Gelombang ke dua pasca Perang Dunia ke II dan gelombang ke tiga pada tahun 1974. Selanjutnya masih ada kemungkinan munculnya gelombang ke empat dan seterusnya (United State Agency, 1991: 25). Secara kronologis menurut penulis demokrasi telah melewati tiga tahap. Yang pertama demokrasi awal pada masa tercetusnya pemikiran demokrasi pada abad ke-5 SM. Tahap ke dua adalah jaman pemikiran modern tentang demokrasi yang ditandai dengan konsep-konsep dari J.J. Rousseau, Montesquieu, John Lock. Tahap ke tiga pasca Perang

Dunia ke dua (Perang dingin). Sedangkan gelombang ke tiga adalah Pasca Perang dingin. Pada masa ini ditandai fenomena munculnya negara-negara demokrasi baru secara spektakuler.

Tahap pertama demokrasi bisa disebut demokrasi jaman Perikles. Pemikiran Perikles sebagai pemikiran awal demokrasi terkesan aneh jika dilihat dari kaca mata demokrasi sekarang ini, namun pemikirannya mengilhami teori-teori politik selanjutnya. Pada masa ini di Athena Yunani sudah terdapat Majelis yang terdiri dari 5000 sampai dengan 6000 anggota. Majelis merupakan lembaga politik pusat yang beranggotakan laki-laki dewasa (wanita, budak dan orang asing) tidak termasuk. Dengan suara mayoritas dapat memutuskan masalah apa saja tanpa pembatasan hukum apapun. Selain itu juga terdapat pengadilan yang dilakukan oleh dewan juri yang beranggotakan 501 yang dapat memutuskan terdakwa melalui suara mayoritas. (United State Agency, 1991: 7)

Dalam demokrasi ini terdapat hal yang unik. Pemimpin Majelis tidak dipilih, tetapi melalui pengundian. Orang Athena percaya bahwa setiap warga mampu menduduki jabatan. Pada masa ini tidak ada lembaga eksekutif seperti presiden ataupun perdana menteri. Semua permasalahan dan pengambilan keputusan ada pada Majelis. Sistem ini tentu menimbulkan hal-hal yang negatif seperti manipulasi dan perpecahan. Pada akhirnya pangung politik dikuasai oleh orang-orang yang ahli pidato yang lihai dan cekatan. Sebagaimana dalam dunia filsafat yang menjadi embrio bagi lahirnya pengetahuan. Pada masa ini

muncul kelompok *sophis* yang lebih mengutamakan kelihaihan dalam berdebat, kemenangan dalam diskusi dari pada kebenaran pengetahuan. (Lihat, Kees Bertens dalam Sejarah Filsafat Yunani). Sistem ini baik dalam praktek demokrasi maupun dalam bidang filsafat dikritik oleh Sokrates dan Plato, sehingga ke dua tokoh ini di cap sebagai tokoh anti demokrasi.

Sementara itu Aristoteles memberikan kritik dengan menelorkan pemikiran filsafat politik yang lebih luas dan komprehensif. Terlepas dari berbagai kekurangan pada praktek demokrasi masa Yunani Kuno, bagaimanapun sistem ini merupakan suatu ide yang luar biasa di tengah-tengah masih kuatnya sistem monarkhi. Pada masa gerakan renaissance tema demokrasi kembali muncul dan dimatangkan dengan landasan pemikiran filsuf besar pada masa itu.

Dalam tahap kedua, konsep demokrasi menuju ke arah pematangan dengan landasan intelektual pada jaman Pencerahan (*Aufklärung*) pada abad ke- 17-18. Tokoh besar yang berpengaruh pada masa ini adalah John Lock, J.J. Rousseau dan Montesquieu. John Lock menerbitkan buku yang sangat terkenal *Two Treaties of Government* tahun 1690. Pandangannya menegaskan bahwa semua pemerintahan yang sah bertumpu pada “persetujuan dari yang diperintah”. Pandangan ini telah mengubah secara mendasar pemikiran politik pada masa ini yang akhirnya mendorong perkembangan lembaga-lembaga demokrasi modern. (United State Agency, 1991, 15). J.J. Rousseau mengembangkan teori *Contract Social*. Montesquieu mengembangkan teori

pemisahan kekuasaan. Dalam *L'Esprit des Lois* (Semangat hukum) mengusulkan pemisahan dan penyeimbangan kekuasaan antara cabang-cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai cara untuk menjamin kebebasan individu (Ibid). Teori dari ke tiga tokoh ini melandasi perkembangan demokrasi modern di berbagai wilayah termasuk demokrasi pada awal terbentuknya pemerintahan Amerika Serikat. Demokrasi modern berkembang sedemikian dahsyat. Demokrasi modern berkembang meluas hampir di seluruh belahan benua dengan warna atau variasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Kondisi ini berlangsung sampai dengan pasca Perang Dunia ke-dua.

Selanjutnya demokrasi memasuki tahap ketiga, yaitu masa pasca Perang Dingin. Program Michael Gorbacev (*Glasnost, Perestroika, dan Democratization*) yang dicanangkan di Uni Sovyet telah menyemaikan benih munculnya negara-negara demokrasi baru di wilayah Eropa Timur. Pada masa ini bisa dikatakan musim panennya demokrasi, karena jumlah negara demokrasi bertambah secara signifikan. Dalam perkembangannya Pasca Perang dingin yang di tandai oleh kemenangan Blok Barat (ideology liberal) telah mengubah peta politik dunia. Demokrasi tidak hanya berkembang dalam kuantitas tetapi juga dalam bentuknya. Pada masa ini masalah demokrasi bukan hanya masalah politik, banyak sekali aspek lain yang ikut mengendalikan. Demokrasi bukan lagi sekedar masalah pemerintahan oleh rakyat. Faktor kekuatan ekonomi menjadi pengendali gerak demokrasi menuju ke arah yang semakin rumit karena banyaknya

kepentingan yang ikut menentukan dalam kancah demokrasi sebagai “permainan”.

B. Keunggulan Demokrasi

Dalam sejarah politik terdapat beberapa sistem/bentuk pemerintahan yang telah dipraktekkan seperti monarkhi, oligarkhi, diktator, dan demokrasi. Sistem pemerintahan manakah yang paling baik? Untuk menjawab pertanyaan ini tidak mudah, tidak sekedar menjawab salah satu dari beberapa sistem tersebut. Dalam hal ini tidak ada jawaban final, bahkan untuk sistem demokrasi sekalipun. Masing-masing sistem mempunyai jamannya sendiri-sendiri. Pada dasarnya munculnya suatu sistem baru itu merupakan antitesa terhadap sistem yang ada sebelumnya.

Pada hakekatnya suatu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan (penguasa) yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. Demokrasi yang dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai sistem yang paling baik belum tentu baik juga bagi sebagian orang di tempat lain. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi negara dan menghadirkan peran negara dalam masyarakat. Kekuasaan negara secara efektif dan factual itu akan dijalankan oleh pemerintah. Pemerintahan merupakan kepanjangan tangan dari negara sehingga ia harus mampu menjalankan fungsi negara. Terlepas apapun ideologinya negara mempunyai fungsi dan tugas minimal yang yang dilaksanakan: (Mariam Budiarjo, 1999: 46)

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Negara bertindak sebagai stabilisator.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Fungsi ini dinggap paling penting terutama bai negara-negara baru

3. Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Dalam perkembangannya pertahanan ini tidak hanya berkaitan dengan serangan dari luar saja, tetapi juga berkaitan dengan segala hal yang membahayakan kedaulatan dan eksistensi negara. Gerakan dari dalampun juga menjadi ranah pertahanan jika hal itu sudah membahayakan bagi kedaulatan, keutuhan, dan eksistensi suatu negara.

4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan dperadilan. (Ibid)

Dari sisi filsafat sejarah, perjalanan negara-negara di dunia bergerak secara spiriodal. Perjalanan itu bergerak secara berkesinambungan, selalu mencari bentuk baru yang semakin lama diaggap semakin baik. Dengan runtuhnya kubu Blok Timur dalam perang dingin, maka sampai saat ini dari bentuk pemerintahan demokrasi dianggap yang paling baik. Pendapat yang ekstrem dikemukakan oleh Francis Fukuyama dalam Bukunya *The End of History*. Dalam diskursus filsafat perang pendapat Fukuyama berada pada kubu *Endisme*. Secara singkat dikatakan bahwa perjalanan sejarah akan mencapai puncaknya dan akan berakhir dengan kemenangan blok barat dengan demokrasi liberalnya.

Dalam kenyataannya dewasa ini demokrasi banyak diterapkan di berbagai negara. Demokrasi bahkan menjadi salah satu pertimbangan ukuran kemajuan suatu bangsa. Sistem demokrasi memang secara faktual mempunyai beberapa keunggulan atau kelebihan di samping kelemahan utamanya. Kelemahan utama demokrasi adalah munculnya *diktator mayoritas*. Kelemahan adalah ini hal yang wajar terutama pada negara demokrasi baru, namun demikian segera harus disadari dan diatasi. Demokrasi memang bukan sistem final yang seratus persen sempurna, sebagaimana sistem yang lain. Demikian juga dengan sistem monarkhi disamping ada kelebihan juga mempunyai kelemahan. Kelemahan monarkhi adalah munculnya *tirani minoritas*.

Dalam pelaksanaannya demokrasi yang berkembang di dunia sangat variatif namun demikian ada beberapa hal yang menjadi ciri umum demokrasi. Demokrasi adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dimana rakyat adalah pemegang kedaulatan. Sedang pemerintah (penguasa) adalah pihak yang diberi kewenangan sebagai pelaksana dari sebagian kekuasaan rakyat. Kepentingan rakyat yang terwakili dan penguasa yang terkontrol merupakan esensi dari demokrasi.

Berikut ini adalah beberapa soko guru yang akan menegakkan demokrasi sebagai suatu bangunan politik

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Jaminan hak asasi manusia
5. Pemilihan yang bebas dan jujur
6. Persamaan di depan hukum

7. Proses hukum yang wajar
8. Pembatasan pemerintahan secara konstusoinal
9. Pluralisme social, ekonomi dan politik
10. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat (United State Agency, 1991: 6)

Sementara itu dalam buku lain disebutkan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi di bawah Rule of Law ialah:

1. Perlindungan konstitusional atas hak-hak individu
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) (Mariam Budiarjo, 1999, 60)

Secara objektif memang terdapat beberapa hal dalam pemerintahan demokrasi yang tidak terdapat dalam sistem lain. Inilah yang menjadi keunggulan demokrasi. Menurut Robert A. Dahl ada beberapa keuntungan dari sistem demokrasi:

1. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik
2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem-sistem lain.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya dari pada alternative lain.
4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.

5. Hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup dibawah hokum yang mereka pilih sendiri.
6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih banyak dari alternatif lain.
8. Pemerintahan demokratis membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi modern tidak berperang satu sama lainnya.
10. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur dari pada pemerintahan yang tidak demokratis. (Robert A. Dahl, 2001: 84-85).

C. Budaya Demokrasi

Demokrasi pada awal kemunculannya memang merupakan konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perjalannya demokrasi bergerak menjadi suatu sistem yang rumit dimana banyak kepentingan terlibat di dalamnya. Suatu sistem yang menyelenggarakan kepentingan warga negara, masyarakat dan negara tentu merupakan suatu yang kompleks.

Sebagai suatu sistem yang sudah disepakati dan akan berlangsung “selamanya” akhirnya akan menjadi budaya. Budaya dalam demokrasi ini mempunyai arti luas. Budaya dalam hal ini tidak dalam arti kata benda

(hasil seni) atau kata kerja (sebagai aktifitas). Budaya dalam hal ini berarti suatu pandangan hidup yang tercermin dalam sikap yang mampu menyuburkan dan melancarkan demokrasi ke arah yang lebih baik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Demokrasi bukanlah suatu sistem yang instan yang begitu diterapkan langsung selesai. Demokrasi bukan suatu sistem yang diterapkan pada mesin, dengan beberapa unsur-unsur yang cocok maka sudah berjalan dengan lancar. Demokrasi adalah suatu sistem yang mengatur mesin besar masyarakat dimana di dalamnya banyak kepentingan yang terlibat. Di dalam “mesin” besar masyarakat ini terdapat banyak sekali komponen-komponen hidup yang sangat dinamis. Dalam hal ini konflik dan pertikaian sering tidak terelakan.

Pelaksanaan demokrasi dengan harus ditopang oleh suatu budaya, yaitu budaya demokrasi. Budaya demokrasi ini bukan suatu sistem yang secara inheren ada dalam demokrasi. Budaya demokrasi juga bukan sederet aturan yang secara hokum mengikat. Budaya demokrasi adalah syarat bagi terbentuknya sistem yang beradab yaitu demokrasi yang berbudaya yang akan meningkatkan harkat dan martabat warga negara sebagai manusia bebas.

Demokrasi sebagai suatu sistem pada akhirnya sangat tergantung pada pelaksanaannya (aktornya). Hal ini berkaitan dengan sikap mental dan perilaku. Budaya ini tidak hanya berfungsi sebagai pelumas sehingga melancarkan jalannya mesin demokrasi, tetapi juga mewujudkan suatu permainan yang bermartabat. Demokrasi sebagai permainan yang

penuh dengan aturan ini merupakan cerminan manusia sebagai *Homo Luden*. Permainan yang manusiawi dan bermartabat ini bisa sebagai penjaga agar demokrasi tidak keluar dari esensinya.

Demokrasi memang sebagai sistem yang sekarang paling bisa diterima, namun harus dilakukan dengan sikap kritis. Demokrasi sendiri tidak menjamin apa-apa. Ia menawarkan kesempatan keberhasilan dan juga menawarkan resiko kegagalan. Demokrasi adalah jannji sekaligus tantangan. Ia menjanjikan bahwa manusia yang bebas, bekerja sama, memerintah diri sendiri, menyatakan aspirasi, kesempatan ekonomi dan keadilan. Ia juga tantangan karena keberhasilan usaha demokratis bertumpu pada pundak warga negara sendiri. (United State Agency, 1991: 31) Pemahaman yang benar terhadap demokrasi dan sikap serta mental yang baik lebih dibutuhkan dari pada seperangkat aturan yang mengikat kuat warganya. Aturan yang baik tidak akan berlaku efektif jika tidak disertai moral yang baik.

Banyak negara yang sukses dalam menerapkan demokrasi, namun juga tidak sedikit yang gagal. Sukses tidaknya demokrasi tidak semata-mata ditandai adanya kebebasan bagi warga negara, namun juga adanya peningkatan pemahaman warga negara akan hak dan kewajiban, toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.

D. Demokrasi Pancasila

Pertanyaan selanjutnya adalah atas dasar semangat/nilai apakah budaya demokrasi akan di bangun. Dalam penyelenggaraan negara Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa,

secara otomatis budaya demokrasi yang dibangun tentu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai *core value*. Yang akan dibangun adalah budaya demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berkembang sekarang ini masih terus bergerak mencari bentuknya, namun sebenarnya secara ideologis dan normatif gerak itu arus mengacu pada demokrasi Pancasila.

Berikut ini beberapa poin tentang makna demokrasi Pancasila:

1. Demokrasi yang dijalankan harus berlandaskan pada nilai Teositas, yaitu nilai-nilai religiusitas yang universal. Segala yang terkait dengan pelaksanaan demokrasi harus dipertanggung jawabkan pada Tuhan sebagai suatu imperatif atas konsekuensi dari sila pertama Pancasila. Nilai teositas dalam ddemokratis ini kelihatan idealis dan utopis, namun bukan berarti tidak mungkin dicapai.
2. Demokrasi yang dijalankan harus berlandaskan nilai humanitas. Yang pokok dalam demokrasi bukan sekedar kebebasan tetapi meningkatnya penghargaan terhadap kemanusiaan. Demokrasi tanpa disertai dengan penghargaan terhadap kemanusiaan seperti demokrasi tanpa isi, hanya sekedar demokrasi basa-basi. Suatu pemerintahan demokratis sejati tidak mungkin mengabaikan nilai fundamental ini. Pemerintahan demokrasi tidak hanya sekedar mensyaratkan secara yuridis formal adanya beberapa perangkat-perangkat demokrasi saja. Suatu negara tidak secara otomatis sebagai negara demokrasi hanya dengan terpenuhinya beberapa persyaratan formal penyelenggaraan negara yang demokratis.

3. Demokrasi yang dijalankan harus semakin menguatkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa harus diutamakan. NKRI harus tetap tegak berdiri dalam kerangka demokrasi. Upaya memecah belah persatuan demi mendapatkan kekuasaan adalah suatu yang etis. Demokrasi Pancasila di dasarkan pada penerimaan dan penghargaan terhadap pluralism. Pluralisme adalah realita bukan problematika.
4. Demokrasi bukanlah tujuan. Kekuasaan dalam demokrasi Pancasila bukanlah tujuan. Tujuan negara Indonesia bukanlah demokrasi. Demokrasi hanyalah sebagai sarana mencapai tujuan nasional. Selain itu ruh dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah. Musyawarah ini adalah budaya yang seharusnya dikembangkan dalam proses demokrasi.
5. Nilai keadilan sosial harus menjadi tujuan. Keadilan dalam kemakmuran rakyat harus menjadu tujuan utama dari proses demokrasi. Tidak ada manfaatnya Indonesia menjadi negara demokrasi kalau kemakmuran rakyat tidak meningkat. Demokrasi dikatakan berhasil jika kemakmuran rakyat meningkat. Demokrasi dikatakan tidak berhasil jika tidak ada peningkatan kemakmuran rakyat (stagnan). Demokrasi dikatakan gagal jika dari proses itu justru menghasilkan kehancuran atau perpecahan. Demokrasi dengan sistem yang menguras terlalu banyak uang rakyat yang menyebabkan kehidupan rakyat terpuruk pada dasarnya tidak sesuai dengan semangat demokrasi

Pancasila. Demokrasi harus menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu pemerintahan yang baik dan para wakil rakyat yang amanah.

Dengan bedasarkan pada makna demokrsi Pancasila yang didasarkan pada *Core values* bangsa Indonesia maka perlu dikembangkan budaya demokrasi. Budaya ini adalah suatu mental demokrat diantaranya adalah:

1. Sikap menerima plurailsme sebagai suatu realita. Keberagaman merupakan kenyataan bukan permasalahan. Indonesia adalah negara yang sangat plural, baik dari segi suku, agama ras dan golongan. Jika sikap mental ini tidak menjadi budaya dalam demokrasi maka yang terjadi adalah serangkaian konflik dan petikaian. Setiap orang harus mau bergaul secara inklusif, dapat menerima kelompok lain tanpa syak wasangka dan curiga. Bagaimanapun keeragaman yang merupakan rahmat ini tidak bisa disamakan tetapi bisa disatukan. Para pendiri negara telah berhasil mempersatuan komponen yang beragam dalam kehidupan negara Indonesia. Kalau semangat pluralisme ini tidak dikembangkan akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap pluralisme ini tidak hanya bersifat pasif yaitu menerima kelompok lain, tetapi juga bersifat aktif yaitu menghargai dan mau bekerjasama dengan kelompok lain. Sebaliknya sikap primordial yang merasa kelompoknyalah yang paling baik harus dihindari.
2. Menghargai perbedaan pendapat. Dalam demokrasi pasti terjadi perbedaan pendapat sebagai

- konsekuensi dari adanya kebebasan. Kebebasan menyuarakan pendapat adalah hak dasar bagi setiap warga negara. Sikap menghargai perbedaan pendapat ini sangat penting untuk dikembangkan. Perbedaan bukan masalah jika disikapi dengan benar. Perbedaan seringkali tidak bisa disatukan dan memang tidak harus dipaksakan untuk satu.
3. Siap kalah dan siap menang. Dalam kompetisi dalam suatu sistem demokrasi setiap kelompok atau orang harus siap kalah. Kekalahan merupakan resiko yang sudah harus dipertimbangkan sebelumnya. Di dalam sebuah permainan kekalahan dan kemenangan adalah biasa. Tidak mau menerima kekalahan bisa memicu konflik. Sikap menerima kekalahan dengan elegan dan jiwa besar memunculkan kedamaian. Demokrasi bukan segala-galanya sehingga orang harus mempertaruhkan semua potensinya.
 4. Dalam demokrasi sikap sportif sangat dibutuhkan. Dalam suatu kompetisi setiap pihak yang terlibat harus bermain secara jujur dan adil. Tujuan yang baik dalam demokrasi harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Di sini sebaiknya dihindari sikap menghalalkan segala cara. Sikap ini tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga rawan memicu konflik.
 5. Mentaati dan menghargai aturan atau Undang-Undang yang berlaku. Demi terciptanya ketertiban maka setiap pihak yang terlibat dalam proses demokrasi harus mentaati segala peraturan yang telah disepakati ataupun Undang-Undang yang berlaku.
 6. Demokrasi sebagai budaya itu perlu ditumbuh kembangkan. Pembudayaan demokrasi itu lewat pembiasaan dan pendidikan. Pendidikan demokrasi sangat diperlukan agar setiap warga negara menyadari hak dan kewajibannya. Pendidikan ini bukan materi yang diberikan secara formal di sekolah. Pendidikan ini bertujuan memberikan edukasi yang baik kepada rakyat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Pendidikan ini ditanamkan lewat pembiasaan. Dalam proses pembiasaan ini akan berjalan lebih efektif jika ada contoh atau teladan dari para politisi, para pejabat, para birokrat. Para pelaku demokrasi atau para politis harus memberikan tauladan yang baik bagi rakyat sehingga mendapatkan pemahaman yang benar tentang demokrasi. Fenomena yang terjadi dewasa ini justru sebaliknya. Para politisi tidak mampu memberikan tauladan atau tuntunan yang baik bagi rakyat. Fanatisme para pendukung (rakyat) seringkali dimanfaatkan sebagai kekuatan *bargaining position* demi mendapatkan kekuasaan. Dalam hal ini yang terjadi bukannya proses transformasi kekuasaan dari rakyat ke pada pemimpin atau wakilnya untuk diperjuangkan dalam lembaga formal, namun sebaliknya rakyatlah yang memperjuangkan dan melindungi para pemimpin atau wakilnya. Fenomena seperti ini sering terjadi di negara demokrasi baru dengan masyarakat yang masih tradisional. Perilaku demokrasi dalam masyarakat tradisional ini ditandai dengan sikap fanatisme berlebihan.

Masyarakat seperti ini berfikir secara emosional (adanya ikatan tertentu), mudah tersulut oleh suatu masalah. Masyarakat ini mudah diprovokasi selayaknya ditangani dengan tepat demi kepentingan yang lebih besar. Dibutuhkan sikap dewasa dari para pelaku demokrasi untuk membawa pendukungnya pada suatu pencerahan.

7. Sikap menghargai lawan

Sikap ini sangat dibutuhkan agar demokrasi sebagai suatu permainan bisa berjalan dengan baik. Sikap menghargai lawan ini pada dasarnya juga merupakan sikap menghargai demokrasi itu sendiri. Tanpa lawan, maka sistem politik ini sama saja dengan monarki (absolut). Lawan adalah teman untuk bertanding. Lawan bukan musuh yang harus disingkirkan. Lawan itu adalah kawan yang boleh dikalahkan. Seseorang tidak boleh memandang lawan dengan penuh kebencian dan permusuhan. Sungguh suatu sikap yang tidak berbudaya jika sikap ini di sebarkan kepada masyarakat untuk mencari dukungan. Permainan yang elegan, damai dan saling menghargai akan memberikan manfaat kepada rakyat, bangsa dan negara.

III. SIMPULAN

Demokrasi adalah masalah yang sudah lama diperbincangkan. Ide yang muncul kira-kira 2500 tahun yang lalu di Athena sampai sekarang masih tetap diperbincangkan secara antusias. Sampai saat ini praktek demokrasi terus berkembang mencari formatnya yang paling baik. Bangsa Indonesia secara konstitusional telah memilih demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai suatu pilihan sistem ini secara imperatif harus dilaksanakan. Dalam kenyataannya banyak sekali muncul permasalahan akibat dari penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai suatu sistem harus ditopang demokrasi sebagai budaya. Dalam tulisan ini berusaha di kaji budaya macam apa yang harus dikembangkan dalam demokrasi di Indonesia, sehingga demokrasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Perkembangan demokrasi memperlihatkan fenomena keluar dari esensinya. Demokrasi yang hanya dilihat sebagai proses politik (pengelolaan kepentingan) akan menghadirkan konflik. Sebagai suatu sistem harus ditopang demokrasi sebagai budaya. Demokrasi yang dikembangkan selayaknya harus berlandaskan didasarkan Pancasila sebagai core values. Dengan demokrasi yang berkualitas, maka kehidupan bangsapun akan meningkat, karena penyelenggaraan pemerintahan negara semua tercakup dalam kerangka sistem demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dahl, Robert. (2001). *On Democracy*. Terjemahan A. Rahman Zainudin. Yale University Press.
- Beachler, Jean. (2001). *Democracy An Analatical Survey*. Terjemahan Bern Hidayat UNESCO, Paris.
- C. Gould, Carol. (1993). *Rethinking Democracy*. Terjemahan Samudra Wibowo, Freedom and Socialy Cooperation in Politics, Economy and Society.
- Mariam Budiardjo. (1999). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Kaelan. "Etika Pancasila" dalam Seminar Nasional Revitalisasi Pancasila dalam Pembangunan Karakter Bangsa, 10 September 2010, FIB UNDIP, Semarang.
- Supriyo Priyanto. (2010). *Pendidikan Kewarganegara-an*. Semarang: Fasindo.
- Suyanto. (2004). *Menjelajah Demokrasi*. Yogyakarta: Liebe Book Press.
- Udin Saparudin. "Pembangunan Karakter dan Nilai-Nilai dalam Demokrasi" makalah Seminar Nasional Revitalisasi Pancasila dalam Pembangunan Karakter Bangsa, 10 September 2010, FIB UNDIP, Semarang.
- United Stated Information Agency. (2001). *What is Democracy?* New York.